

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, tanpa memandang tingkat perkembangan ekonominya. Pada tataran global, isu kemiskinan telah menjadi agenda prioritas pembangunan internasional yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun. Menurut laporan Bank Dunia (World Bank, 2024), sekitar 700 juta orang di seluruh dunia masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem dengan pengeluaran di bawah 2,15 dolar AS per hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan individual, melainkan tantangan struktural yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan secara global (Wulandari & Simatupang, 2025).

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh negara-negara di dunia melalui beragam pendekatan, mulai dari kebijakan fiskal, program perlindungan sosial, hingga penguatan sektor keuangan inklusif. Namun demikian, efektivitas upaya-upaya tersebut sangat bergantung pada kondisi makroekonomi masing-masing negara, termasuk stabilitas harga, laju pertumbuhan ekonomi, serta kedalaman akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dalam konteks negara-negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, pendekatan berbasis keuangan syariah semakin mendapat perhatian sebagai instrumen alternatif pengentasan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan distribusi pendapatan (Arsyianti, 2025).

Di kawasan Asia Tenggara, kemiskinan masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan meskipun kawasan ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam dua dekade terakhir. Negara-negara berkembang di kawasan ini, termasuk Indonesia, menghadapi tekanan ganda yakni antara mendorong pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan memastikan pemerataan kesejahteraan di sisi lain. Ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses

keuangan, serta kerentanan terhadap guncangan ekonomi eksternal menjadi faktor-faktor yang memperparah kondisi kemiskinan di kawasan ini. Dalam konteks inilah, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara menghadapi tanggung jawab besar untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan dan berkeadilan (Dassucik & Farida, 2025).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada 2024 mencapai 281,6 juta jiwa, meningkat 1,04% dibanding 2023. Pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung menimbulkan berbagai tantangan, salah satunya adalah kemiskinan. Meskipun kemiskinan merupakan permasalahan universal yang dialami berbagai negara, isu ini tetap menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi. Secara fundamental, kemiskinan menghambat pembangunan nasional. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar menurunkan produktivitas masyarakat. Selain itu, rendahnya pendapatan membuat rumah tangga miskin tidak mampu menabung atau berinvestasi, sehingga mempersempit peluang mobilitas ekonomi (Ulya et al., 2025).

Fenomena kemiskinan di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Meskipun dalam jangka panjang angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, pada periode tertentu terjadi peningkatan yang signifikan. Selain itu, kemiskinan di Indonesia juga memiliki karakteristik struktural yang sulit diatasi dalam jangka pendek. Menurut penelitian (Madaliyah & Rohmah, 2024) kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, serta distribusi pendapatan yang tidak merata. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat terjebak dalam lingkaran kemiskinan (*poverty trap*), di mana rendahnya pendapatan menyebabkan terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif, sehingga sulit untuk meningkatkan taraf hidup.

Penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti, 2024) menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, namun tidak semua variabel ekonomi memberikan pengaruh yang

konsisten terhadap kemiskinan. Sementara itu tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi yang berubah-ubah, terutama dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penurunan tingkat kemiskinan menjadi fokus utama kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam upaya mencapai target SDGs yang telah disepakati Indonesia sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan. Untuk melihat gambaran nyata pergerakan tingkat kemiskinan di Indonesia secara lebih terperinci, berikut disajikan data perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan selama periode 2015 hingga 2024 pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Tingkat Kemiskinan Indonesia

Tahun	Jumlah Jiwa (Juta)	Kemiskinan (%)
2015	28,59	11,13
2016	27,76	10,86
2017	26,58	10,12
2018	25,67	9,82
2019	25,14	9,41
2020	26,42	9,78
2021	27,54	10,14
2022	26,36	9,54
2023	25,9	9,36
2024	25,22	9,03

Sumber: Badan Statistik Nasional 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.1 tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam jangka panjang. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 28,59 juta jiwa atau 11,13 persen, kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen pada tahun 2019. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta peningkatan efektivitas program pembangunan dalam mengurangi kemiskinan.

Namun demikian, pada periode 2020 hingga 2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, yaitu dari 25,14 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 26,42 juta jiwa pada tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 27,54 juta jiwa pada tahun 2021. Secara persentase, kemiskinan juga meningkat dari 9,41 persen menjadi 10,14 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan terhadap kesejahteraan masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, pada periode 2022 hingga 2024, tingkat kemiskinan kembali menunjukkan tren penurunan. Jumlah penduduk miskin menurun menjadi 26,36 juta jiwa pada tahun 2022, kemudian menjadi 25,9 juta jiwa pada tahun 2023, dan mencapai 25,22 juta jiwa atau 9,03 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Fluktuasi tingkat kemiskinan yang telah diuraikan di atas tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika variabel-variabel makroekonomi yang bergerak secara bersamaan.

Secara keseluruhan, pola fluktuasi kemiskinan yang terjadi sepanjang periode 2015–2024 mencerminkan betapa rentannya kondisi kesejahteraan masyarakat terhadap perubahan kondisi ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Akib et al., 2025) yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial yang bersifat dinamis. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan satu pendekatan tunggal, melainkan memerlukan strategi yang terintegrasi dan mempertimbangkan berbagai variabel makroekonomi yang saling berinteraksi. Untuk mengidentifikasi keterkaitan tersebut, berikut disajikan data perkembangan aset perbankan syariah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2015 hingga 2024 pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Jumlah Aset Perbankan Syariah, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Tahun 2015-2024

Tahun	Jumlah Aset Perbankan Syariah (Triliun)	Inflasi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015	296.262	3.35	5.04

Tahun	Jumlah Aset Perbankan Syariah (Triliun)	Inflasi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016	356.504	3.02	5.02
2017	424.181	3.61	5.07
2018	477.327	3.13	5.18
2019	524.564	2.72	5.02
2020	593.948	1.68	-2.07
2021	676.735	1.87	5.02
2022	782.100	5.51	5.31
2023	868.986	2.61	5.05
2024	955.263	1.57	5.03

Sumber: Badan Statistik Nasional 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, perkembangan aset perbankan syariah Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp296,26 triliun dan terus mengalami peningkatan secara berkelanjutan hingga mencapai Rp955,26 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi yang hampir tiga kali lipat dalam kurun waktu satu dekade, menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah serta meningkatnya jangkauan layanan perbankan syariah kepada berbagai segmen masyarakat. Meskipun demikian, pesatnya perkembangan perbankan syariah tersebut belum secara otomatis berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia, mengingat pada periode yang sama tingkat kemiskinan masih menunjukkan fluktuasi. Hal inilah yang mendorong perlunya pengujian empiris mengenai sejauh mana perkembangan perbankan syariah benar-benar berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2015–2024 sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian ini (Fadila et al., 2025).

Sementara itu, laju inflasi Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dan memiliki keterkaitan yang erat dengan pergerakan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2015, inflasi berada pada level 3,35 persen dan cenderung

menurun hingga mencapai 2,72 persen pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, inflasi turun ke level terendah sebesar 1,68 persen yang paradoksnya justru terjadi bersamaan dengan peningkatan angka kemiskinan akibat dampak pandemi. Penurunan inflasi pada masa pandemi ini bukan mencerminkan perbaikan daya beli masyarakat, melainkan disebabkan oleh melemahnya permintaan agregat secara masif akibat pembatasan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, inflasi melonjak tajam ke level tertinggi sebesar 5,51 persen pada tahun 2022, dipicu oleh gangguan rantai pasok global dan kenaikan harga energi serta pangan internasional. Lonjakan inflasi ini menjadi ancaman nyata bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah karena kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak langsung pada penurunan daya beli riil mereka, sehingga berpotensi mendorong peningkatan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2023 dan 2024, inflasi kembali mereda menjadi 2,61 persen dan 1,57 persen sejalan dengan penurunan angka kemiskinan pada periode yang sama. Pola ini memperkuat relevansi inflasi sebagai salah satu variabel penjelas tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2015–2024 yang diuji dalam penelitian ini.

Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2015–2024 secara umum menunjukkan stabilitas yang cukup baik, meskipun terdapat satu titik kontraksi yang sangat signifikan. Pada periode 2015–2019, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,02 hingga 5,18 persen, mencerminkan kondisi perekonomian yang stabil dan ekspansif. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi tajam menjadi -2,07 persen sebagai dampak langsung pandemi COVID-19 yang menyebabkan terhentinya berbagai aktivitas ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan menurunnya konsumsi rumah tangga secara signifikan. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini secara bersamaan berkontribusi pada kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2020–2021 sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi pulih kembali ke level 5,02 persen pada tahun 2021 dan tumbuh stabil pada kisaran 5,03 hingga 5,31 persen hingga tahun 2024. Pemulihan pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan kembali menurunnya angka kemiskinan pada periode yang sama, memperkuat argumen bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2015–2024 sebagaimana dikaji dalam penelitian ini (G. A. Putri, 2026).

Apabila ketiga variabel pada Tabel 1.2, yaitu perkembangan perbankan syariah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, dikaitkan secara bersamaan dengan data kemiskinan pada Tabel 1.1, terlihat adanya pola keterkaitan yang relevan dengan fokus penelitian ini. Pada periode 2020–2021, kontraksi pertumbuhan ekonomi yang tajam terbukti mendorong kenaikan angka kemiskinan meskipun inflasi berada pada level rendah, menunjukkan bahwa stabilitas harga saja tidak cukup apabila tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang positif. Sebaliknya, pada periode 2022–2024, kombinasi antara pemulihan pertumbuhan ekonomi dan terkendalinya inflasi terbukti mampu mendorong penurunan angka kemiskinan secara bertahap. Di sisi lain, perkembangan aset perbankan syariah yang terus tumbuh konsisten sepanjang 2015–2024 mengindikasikan potensi kontribusinya dalam memperluas inklusi keuangan masyarakat miskin, meskipun pengaruh langsungnya terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia masih memerlukan pengujian empiris yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis sejauh mana pengaruh perkembangan perbankan syariah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2015–2024 guna mengisi kesenjangan tersebut.

Kajian mengenai pengaruh antara perbankan syariah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya dengan berbagai pendekatan dan cakupan yang berbeda-beda. Penelitian (Zuhdi, 2020) membuktikan bahwa inklusi keuangan syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, di mana semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah terbukti mampu menurunkan persentase penduduk miskin secara nyata. (Susanto & Pangesti, 2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, artinya setiap kenaikan laju inflasi akan secara langsung memperburuk kondisi kemiskinan terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara itu, (Ningsih & Andiny, 2018) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan, menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi merupakan prasyarat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian (Saefulloh et

al., 2023) juga menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dalam jangka panjang, meskipun dalam jangka pendek dampaknya tidak selalu konsisten karena sangat bergantung pada inklusivitas proses pertumbuhan itu sendiri. Adapun (Al Badri, 2025) menemukan bahwa aset perbankan syariah tidak berpengaruh langsung terhadap penurunan kemiskinan, melainkan bekerja melalui fungsi intermediasi keuangan yang membutuhkan penguatan lebih lanjut agar dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat miskin.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diperhatikan. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu menguji variabel-variabel tersebut secara parsial, baik hanya berfokus pada perbankan syariah, hanya pada inflasi, maupun hanya pada pertumbuhan ekonomi, sehingga belum dapat menangkap pengaruh simultan ketiga variabel terhadap kemiskinan. Kedua, penelitian yang menggabungkan dua variabel sekaligus masih mengabaikan peran perbankan syariah sebagai instrumen keuangan yang berkembang pesat dan relevan dalam konteks pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ketiga, sebagian besar penelitian menggunakan data panel provinsi yang tidak mencerminkan kondisi agregat nasional, atau menggunakan data time series dengan periode yang pendek sehingga tidak mampu menangkap dinamika jangka panjang termasuk dampak pandemi dan pemulihan ekonomi paska pandemi. Keempat, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh simultan perkembangan perbankan syariah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam cakupan nasional dengan periode panjang 2015–2024.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan secara simultan tiga variabel utama, yaitu perkembangan perbankan syariah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, dalam satu model analisis untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kedua, penelitian ini menggunakan data time series nasional dengan rentang waktu yang lebih panjang, yaitu tahun 2015 hingga 2024, sehingga mampu menangkap dinamika ekonomi yang lebih komprehensif mencakup periode pra-

pandemi, masa pandemi dan fase pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi empiris baru terhadap literatur ekonomi syariah di Indonesia dengan menguji apakah pesatnya perkembangan aset perbankan syariah yang hampir tiga kali lipat dalam satu dekade benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan ketika dikontrol oleh variabel makroekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dari berbagai uraian di atas, terlihat jelas bahwa kajian sebelumnya masih memiliki keterbatasan baik dari sisi kelengkapan variabel, cakupan wilayah, maupun rentang periode penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi terkini perekonomian Indonesia. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perkembangan Perbankan Syariah, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015–2024.”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dan belum sepenuhnya dapat ditekan secara konsisten, sehingga diperlukan identifikasi variabel-variabel yang secara signifikan memengaruhi pergerakannya.
- b. Perkembangan aset perbankan syariah yang hampir tiga kali lipat selama periode 2015–2024 belum secara otomatis berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan, sehingga peran perbankan syariah dalam pengentasan kemiskinan masih perlu dibuktikan secara empiris.
- c. Fluktuasi inflasi yang tajam sepanjang periode 2015–2024, dengan lonjakan tertinggi sebesar 5,51 persen pada tahun 2022, berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, namun pengaruhnya belum dikaji secara komprehensif bersama variabel lainnya.

- d. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergerak tidak stabil sepanjang periode 2015–2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan yang tidak inklusif tidak selalu mampu mendorong penurunan kemiskinan secara merata dan konsisten.
- e. Temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh perbankan syariah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan masih bersifat parsial dan tidak konsisten, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih komprehensif dan simultan dalam satu model penelitian yang utuh.
- f. Belum terdapat penelitian yang menganalisis pengaruh perkembangan perbankan syariah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan cakupan data nasional periode 2015–2024.

2. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap terarah, fokus, dan tidak menyimpang dari tujuan utama, peneliti menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

- a. Objek penelitian dibatasi pada tingkat kemiskinan di Indonesia secara agregat nasional.
- b. Periode penelitian dibatasi dari tahun 2015 hingga 2024.
- c. Variabel bebas (X) yang diteliti terdiri dari Perkembangan Perbankan Syariah (X1), Inflasi (X2), dan Pertumbuhan Ekonomi (X3).
- d. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan di Indonesia
- e. Penelitian ini hanya berfokus pada hubungan dan pengaruh statistik antara variabel perkembangan perbankan syariah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tanpa membedakan kondisi antarwilayah atau antarprovinsi.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaruh perkembangan perbankan syariah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015 hingga 2024 di Indonesia?
- b. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015 hingga 2024?

- c. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015 hingga 2024?
- d. Apakah perkembangan perbankan syariah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2015 hingga 2024?

C. Tujuan penelitian

1. Menganalisis pengaruh perkembangan perbankan syariah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh perkembangan perbankan syariah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan ekonomi pembangunan. Temuan penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh perkembangan perbankan syariah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan teori dan model analisis yang berkaitan dengan peran sektor keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan serta pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan dan penguatan industri perbankan syariah agar semakin berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

- c. Bagi Bank Indonesia (BI), Memberikan informasi pendukung terkait hubungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan moneter.
- d. Bagi Perbankan Syariah, Menjadi referensi untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan dan inovasi produk yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- e. Bagi Peneliti Selanjutnya, Menjadi sumber referensi empiris dan dasar bagi penelitian lanjutan terkait hubungan antara variabel makroekonomi dan kemiskinan.

E. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan kajian teoritis yang melandasi penelitian, dengan mengemukakan teori-teori yang relevan terkait variabel-variabel penelitian, mencakup pengertian Kemiskinan, Perkembangan perbankan Syariah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, tinjauan penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis yang disusun berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan prosedur dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, yang terdiri dari uraian mengenai objek penelitian, definisi operasional variabel sumber dan jenis data penelitian, model penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti melalui penerapan teknik analisis data, dengan menjelaskan temuan analisis mengenai analisis pengaruh perkembangan perbankan syariah, inflasi dan

pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2015 - 2024.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang menyajikan kesimpulan dari analisis terhadap permasalahan penelitian serta rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan temuan penelitian.

